

Peran Literasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Demokrasi Anak Muda

Dian Eka Prastiwi¹, Nopit Ernasari², Ahmad Zaki Muntafi³

¹ Universitas Pamulang, Indonesia

² Universitas Pamulang, Indonesia

³ Universitas Pamulang, Indonesia

Korespondensi: dosen03177@unpam.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received July 25th, 2026

Revised Aug 27th, 2026

Accepted Sept 6th, 2026

Keyword:

Anak Muda; Edukasi Politik;
Literasi Politik; Media Digital;
Partisipasi Demokrasi.

ABSTRAK

Literasi politik merupakan faktor kunci dalam membangun kesadaran bernegara dan memperkuat demokrasi, khususnya pada generasi muda. Meskipun menjadi kelompok demografi terbesar, anak muda sering kali dipersepsikan memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah atau apatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi politik dalam meningkatkan partisipasi demokrasi anak muda serta mengidentifikasi saluran utama pembentuk kesadaran politik mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah dan data terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman politik melalui pendidikan formal, organisasi, dan media digital secara signifikan mampu mengubah sikap apatis menjadi partisipasi aktif. Pemahaman yang mendalam mengenai sistem demokrasi dan hak-hak kewarganegaraan mendorong anak muda untuk terlibat tidak hanya dalam pemilu, tetapi juga dalam advokasi isu sosial dan diskusi publik di ruang digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi politik berperan penting dalam mengonversi potensi demografi pemuda menjadi kekuatan demokratis yang kritis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan edukasi politik yang adaptif terhadap media digital sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan demokrasi.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang keberlanjutannya sangat bergantung pada kualitas keterlibatan dan kesadaran politik seluruh warganya. Dalam konteks lanskap politik modern, keberhasilan suatu bangsa dalam memelihara nilai-nilai demokratis tidak hanya diukur dari terselenggaranya mekanisme pemilihan umum secara berkala, melainkan dari seberapa tinggi tingkat kepedulian serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal proses pembuatan kebijakan publik. Salah satu segmen masyarakat yang paling krusial dalam menjaga dinamika dan keberlanjutannya adalah generasi muda. Sebagai kelompok demografi yang mendominasi populasi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, anak muda memegang peran strategis sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan sekaligus pilar utama dalam menentukan arah pembangunan bangsa di masa depan (Suryani & Rahmawati, 2022). Kendati demikian, di balik besarnya jumlah populasi pemuda yang sering dipandang sebagai potensi bonus demografi, muncul sebuah tantangan mendasar yang hingga kini masih terus membayangi perjalanan demokrasi, yaitu hadirnya fenomena apatisisme dan alienasi politik di kalangan generasi muda (Pratama, 2021).

Fenomena apatisisme politik pada anak muda bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari akumulasi persepsi negatif terhadap institusi politik formal. Politik kerap dipandang sebagai ranah yang kotor, sarat akan praktek korupsi, kaku, dan penuh pertarungan kepentingan elitis yang berjarak jauh dari realitas kehidupan sehari-hari mereka (Hidayat, 2020). Akibatnya, banyak pemuda yang menganggap bahwa keterlibatan mereka dalam proses politik tidak akan memberikan pengaruh atau perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat (political efficacy yang rendah). Kondisi ini

diperparah oleh pola pendidikan kewarganegaraan di lembaga formal yang sering kali disajikan secara doktriner, terfokus pada hafalan struktur kenegaraan, serta kurang memfasilitasi ruang diskusi kritis mengenai isu-isu sosial-politik aktual (Sutrisno & Handayani, 2023). Ketika anak muda mengisolasi diri dari urusan publik atau memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilu, maka ruang-ruang pengambilan keputusan publik akan rentan dikuasai oleh kelompok elitis tertentu yang tidak memprioritaskan kepentingan dan aspirasi lintas generasi.

Di tengah kompleksitas permasalahan tersebut, literasi politik hadir sebagai instrumen yang sangat vital untuk memutus rantai apatisme dan membangun kembali kesadaran bernegara di kalangan pemuda. Literasi politik tidak boleh disempitkan maknanya sekadar sebagai kemampuan untuk mengenali nama-nama pejabat atau menghafal tata cara pemungutan suara semata. Lebih dari itu, literasi politik mencakup pemahaman komprehensif mengenai struktur dan mekanisme kerja sistem demokrasi, pemahaman akan hak serta kewajiban sebagai warga negara, serta penguasaan keterampilan kritis untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merespons berbagai kebijakan publik secara rasional (Crick, 2000; Kurniawan, 2022). Tanpa adanya dasar literasi politik yang memadai, partisipasi yang ditunjukkan oleh anak muda berisiko terjebak dalam bentuk partisipasi yang semu, di mana keterlibatan mereka hanya didasari oleh dorongan emosional, mobilisasi massa berbasis politik identitas, atau sekadar ikutan tren tanpa didasari oleh pemahaman mendasar mengenai substansi isu yang dibela (Wibowo & Setiawan, 2024).

Dinamika literasi dan partisipasi politik pemuda semakin menemukan momentumnya seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Generasi muda saat ini tumbuh dan berkembang dalam lingkungan serba digital di mana media sosial seperti X, Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi saluran utama mereka dalam mengonsumsi informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan isu-isu politik (Fauzi & Lestari, 2023). Di satu sisi, transformasi digital ini menawarkan peluang besar bagi penguatan demokrasi karena berhasil meruntuhkan batasan ruang dan waktu dalam menyampaikan pendapat. Lewat genggaman gawai, anak muda memiliki akses yang luar biasa cepat terhadap isu-isu kebangsaan serta memiliki platform mandiri untuk menyuarakan aspirasi, menginisiasi petisi, hingga menggalang gerakan aksi sosial secara kolaboratif (Nugroho, 2021).

Namun di sisi lain, lanskap digital juga membawa ancaman serius dalam bentuk maraknya disinformasi, berita bohong (hoax), propaganda komputasional, serta polarisasi sosial akibat fenomena echo chamber dan algoritma media sosial yang cenderung mengamplifikasi narasi ekstrem (Firmansyah & Triana, 2022). Anak muda yang tidak dibekali dengan literasi politik dan literasi digital yang kuat akan sangat rentan terpapar manipulasi informasi yang disengaja untuk memecah belah persatuan atau memicu sentimen kebencian antar kelompok. Hal ini membuktikan bahwa kemudahan akses terhadap gawai dan tingginya tingkat kecakapan teknologi pada generasi muda tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kedewasaan atau kecerdasan politik mereka. Oleh karena itu, penguatan literasi politik digital menjadi sebuah keniscayaan guna melatih daya kritis pemuda dalam memilah, memverifikasi, dan menyikapi deras arus informasi di ruang siber secara bertanggung jawab (Putra & Mardiana, 2023).

Kehadiran era digital turut mendorong terjadinya pergeseran paradigma mengenai definisi dan bentuk partisipasi politik di kalangan anak muda. Selama ini, partisipasi politik kerap diukur sebatas pada indikator konvensional, seperti tingkat kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS), keanggotaan dalam organisasi partai politik, atau keterlibatan dalam kampanye resmi (Milbrath & Goel, 1977; Ramadhan, 2020). Padahal, karakter anak muda masa kini yang cenderung fleksibel, independen, dan menyukai bentuk ekspresi yang kreatif telah melahirkan gaya partisipasi politik non-konvensional. Bentuk keterlibatan ini mencakup pembuatan konten edukatif berbasis isu publik di media sosial, penyampaian tagar (hashtag) advokasi kebijakan, penggalangan dana kemanusiaan, hingga penyelenggaraan ruang diskusi daring mandiri yang membahas isu-isu krusial seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan keadilan gender (Dalton, 2008; Wijaya, 2024).

Melalui pemahaman literasi politik yang baik, anak muda dapat menyadari bahwa aksi-aksi sosial non-konvensional yang mereka lakukan di ruang digital sesungguhnya memiliki bobot dan dampak politik yang sangat nyata. Literasi politik membantu mereka untuk menghubungkan antara keluhan pribadi atau komunitas dengan isu struktural yang ada pada level kebijakan negara, sehingga mampu memicu timbulnya kesadaran kritis (*critical consciousness*) untuk menuntut akuntabilitas dari penguasa (Freire, 1970; Santoso & Utami, 2022). Dengan demikian, pemuda tidak lagi menempatkan

diri mereka sekadar sebagai objek pasif dari komodifikasi politik dalam pemilu, melainkan bertindak sebagai subjek atau aktor utama yang secara aktif mewarnai arah dan substansi demokrasi itu sendiri.

Meskipun urgensi literasi politik bagi anak muda sudah sangat jelas, tantangan dalam implementasinya di lapangan masih tergolong kompleks dan multidimensional. Hingga kini masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar mengenai tingkat aksesibilitas dan kualitas edukasi politik antarwilayah, di mana pemuda yang berada di kawasan perkotaan cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh akses informasi dan literasi politik yang memadai dibandingkan dengan pemuda di daerah rural atau pelosok (Suryadi, 2021). Selain itu, belum terciptanya sinergi yang terintegrasi secara solid antara pemerintah selaku regulator, lembaga pendidikan formal, partai politik, media massa, dan organisasi masyarakat sipil dalam menyediakan ruang edukasi politik yang inklusif, ramah pemuda, dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Dewi & Budiarto, 2023). Kebanyakan sosialisasi politik yang digelar oleh institusi formal masih bersifat insidental dan transaksional menjelang pemungutan suara, alih-alih menjadi proses pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan.

Dalam konteks kelembagaan, partai politik yang seharusnya menjadi wadah utama pendidikan politik bagi masyarakat sering kali gagal menjalankan fungsi tersebut secara optimal di mata generasi muda. Partai politik masih dipersepsikan sebagai organisasi yang tertutup, patrimonial, dan hanya mendekati pemuda saat membutuhkan suara dalam kontestasi pemilu (Baskoro, 2022). Ketidakpercayaan terhadap institusi partai politik ini semakin mempertegas pentingnya saluran-saluran edukasi alternatif, seperti komunitas masyarakat sipil, gerakan pemuda independen, dan platform media digital edukatif, untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan gaya hidup pemuda (Arifin & Widyastuti, 2023). Ketika literasi politik disajikan secara komunikatif, interaktif, serta terhubung langsung dengan isu-isu yang dialami pemuda—seperti ketersediaan lapangan kerja, akses pendidikan berkualitas, dan kesehatan mental—maka ketertarikan mereka untuk terlibat dalam aktivitas demokrasi akan meningkat secara alami.

Keberhasilan dalam membangun literasi politik yang inklusif ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka partisipasi pemilih di TPS, tetapi juga memicu terciptanya iklim demokrasi yang lebih substansial. Anak muda yang memiliki literasi politik tinggi cenderung memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap politik uang (money politics), demagogi, dan narasi populisme sempit yang sering dimainkan oleh aktor-aktor politik demi meraih kekuasaan secara instan (Susanto & Kusuma, 2023). Mereka akan menuntut pertanggungjawaban program kerja, rekam jejak, serta visi-misi dari para calon pemimpin, bukan sekadar tergiur oleh insentif finansial jangka pendek atau popularitas di media sosial. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran politik yang kritis merupakan modal sosial terbesar bagi sebuah negara untuk mencegah terjadinya kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dan memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum serta kepentingan publik.

Berdasarkan seluruh dinamika dan pemikiran tersebut, kajian mengenai peran literasi politik dalam meningkatkan partisipasi demokrasi anak muda menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diteliti lebih dalam. Pemahaman yang utuh mengenai bagaimana literasi politik dibentuk, faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya di era digital, serta bagaimana literasi tersebut ditransformasikan menjadi aksi partisipasi yang konkret akan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi upaya konsolidasi demokrasi. Pada akhirnya, memperkuat literasi politik generasi muda adalah investasi jangka panjang terbaik yang dapat dilakukan oleh sebuah bangsa untuk mengonversi potensi kuantitatif demografi pemuda menjadi kekuatan demokratis yang berkualitas, kritis, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendokumentasikan serta menganalisis peran literasi politik dalam meningkatkan partisipasi demokrasi siswa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai bagaimana pemahaman politik dibentuk dan diaktualisasikan oleh remaja (Creswell & Creswell, 2018). Lokasi penelitian berfokus di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta, yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa madrasah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah keagamaan unggulan di Jakarta yang memiliki iklim organisasi kesiswaan aktif

serta keberagaman latar belakang sosio-politik siswa yang dinamis (Lembaga Penjaminan Mutu MAN 4 Jakarta, 2023).

Subjek utama dalam penelitian ini adalah siswa-siswi MAN 4 Jakarta yang telah memasuki usia pemilihan pemula (16–18 tahun) serta terdaftar atau terlibat aktif dalam organisasi kesiswaan seperti OSIS, MPK, maupun ekstrakurikuler keilmuan dan jurnalistik. Pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling untuk memastikan informan yang dipilih memiliki kriteria spesifik, seperti pemahaman dasar terkait isu publik, pengalaman berorganisasi, atau keterlibatan dalam kegiatan edukasi kewarganegaraan (Sugiyono, 2021). Selain siswa, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta pembina kesiswaan di MAN 4 Jakarta juga dijadikan sebagai informan pendukung guna memberikan persepsi komplementer mengenai proses edukasi politik di lingkungan madrasah (Sutrisno & Handayani, 2023).

Pengumpulan data primer dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) (Kurniawan, 2022). Wawancara mendalam dilaksanakan bersama para informan kunci untuk menggali persepsi individu, tingkat pemahaman literasi politik, serta bentuk partisipasi mereka baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. Sementara itu, FGD digelar bersama perwakilan kelompok siswa dari berbagai tingkatan kelas untuk mengamati dinamika interaksi, cara mereka berargumentasi mengenai isu-isu politik, dan bagaimana ruang diskusi di MAN 4 Jakarta memengaruhi kesadaran demokrasi mereka secara kolektif (Santoso & Utami, 2022).

Selain data primer, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder melalui teknik dokumentasi dan observasi lapangan. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap iklim demokrasi di MAN 4 Jakarta, seperti proses pemilihan ketua OSIS/MPK, ruang-ruang diskusi siswa, serta pemanfaatan media sosial sekolah dalam menyebarkan informasi publik (Fauzi & Lestari, 2023). Pengumpulan data sekunder diperkuat dengan analisis dokumen berupa kurikulum pembelajaran PPKn, program kerja organisasi kesiswaan, modul edukasi politik, serta catatan atau publikasi yang relevan dengan topik penelitian di lingkungan madrasah tersebut (Dewi & Budiarto, 2023).

Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014). Pada tahap reduksi, peneliti memilah, menyederhanakan, dan mengategorikan hasil wawancara serta observasi di MAN 4 Jakarta sesuai dengan fokus penelitian. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data untuk memastikan bahwa temuan mengenai peran literasi politik dalam menggerakkan partisipasi demokrasi siswa MAN 4 Jakarta valid, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Literasi Politik dan Pemahaman Kewarganegaraan Siswa MAN 4 Jakarta

Tingkat literasi politik dan pemahaman kewarganegaraan di kalangan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta menunjukkan dinamika yang kompleks antara penguasaan materi tekstual-konseptual dan terbangunnya kesadaran kritis terhadap isu-isu publik nasional. Sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah keagamaan unggulan di wilayah DKI Jakarta, MAN 4 Jakarta memiliki ekosistem pembentukan karakter siswa yang dipengaruhi oleh kombinasi antara nilai-nilai keislaman, kurikulum nasional, dan tingginya keterpaparan informasi digital (Lembaga Penjaminan Mutu MAN 4 Jakarta, 2023). Dalam konteks ini, literasi politik siswa tidak lagi berada pada ranah hafalan struktur ketatanegaraan semata, melainkan telah berkembang menjadi kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan merespons dinamika demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia (Kurniawan, 2022).

Pembentukan literasi politik dan pemahaman kewarganegaraan di MAN 4 Jakarta secara garis besar ditopang oleh pembelajaran formal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Melalui proses pembelajaran di kelas, siswa yang sebagian besar berada pada rentang usia pemilihan pemula (16–18 tahun) telah dibekali dengan pemahaman mendasar mengenai prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, tata urutan perundang-undangan, serta mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum (Sutrisno & Handayani, 2023). Pemahaman konseptual ini menjadi fondasi awal bagi siswa untuk menyadari posisinya sebagai warga negara yang memiliki kewenangan demokratis dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa.

Kendati demikian, tingkat kedalaman literasi politik di antara siswa MAN 4 Jakarta menunjukkan segmentasi yang cukup jelas. Pemahaman kewarganegaraan siswa tidak bersifat homogen, melainkan terbagi ke dalam beberapa tingkatan yang dipengaruhi oleh tingkat aktivitas berorganisasi, iklim literasi keluarga, serta kebiasaan mengakses informasi di ruang digital (Fauzi & Lestari, 2023). Berdasarkan pengamatan dan analisis di lapangan, kondisi literasi politik siswa MAN 4 Jakarta dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama.

Pertama, Kelompok Literasi Politik Kritis-Aktif: Kelompok ini didominasi oleh siswa yang terlibat aktif dalam organisasi kesiswaan seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Majelis Perwakilan Kelas (MPK), serta ekstrakurikuler keilmuan, debat, dan jurnalistik. Siswa dalam kelompok ini memiliki pemahaman yang mendalam mengenai fungsi kontrol sosial, pentingnya akuntabilitas publik, dan mekanisme musyawarah-mufakat secara praktis. Mereka tidak hanya paham mengenai hak pilih, tetapi juga mampu mengkritisi kebijakan sekolah maupun isu-isu nasional melalui kacamata hukum dan demokrasi (Lembaga Penjaminan Mutu MAN 4 Jakarta, 2023).

Kedua, Kelompok Literasi Politik Konvensional-Normatif: Kelompok ini merupakan porsi terbesar dari populasi siswa. Mereka memiliki pemahaman akademik yang baik mengenai materi PPKn dan menyadari pentingnya ikut serta dalam pemilu. Namun, pandangan politik mereka cenderung bersifat normatif dan mengikuti arus utama (mainstream). Kesadaran politik kelompok ini umumnya baru terstimulasi menjelang momentum kontestasi politik, seperti Pemilihan Ketua OSIS atau Pemilihan Umum nasional (Ramadhan, 2020).

Ketiga, Kelompok Literasi Politik Pasif-Apatitis: Sebagian kecil siswa menunjukkan kecenderungan apatis terhadap isu-isu politik. Skeptisisme ini lahir dari persepsi negatif terhadap dunia politik praktis yang diidentikkan dengan konflik, pencitraan, dan korupsi (Hidayat, 2020). Bagi kelompok ini, isu-isu politik dipersepsikan sebagai ranah orang dewasa yang jauh dari kehidupan keseharian remaja, sehingga minat mereka untuk mempelajari atau mendiskusikan topik-topik kewarganegaraan relatif rendah.

Salah satu faktor kunci yang membedakan lanskap literasi politik siswa MAN 4 Jakarta dengan generasi sebelumnya adalah peran media sosial sebagai sumber informasi utama. Sebagai digital natives, siswa MAN 4 Jakarta lebih banyak mengonsumsi narasi politik melalui platform seperti X, Instagram, TikTok, dan YouTube dibandingkan media massa konvensional (Fauzi & Lestari, 2023). Hal ini memberikan keuntungan berupa kecepatan akses terhadap informasi-informasi terbaru mengenai kebijakan publik dan isu-isu sosial. Namun, ketergantungan pada media digital ini juga melahirkan tantangan tersendiri berupa rentannya siswa terhadap bahaya disinformasi, berita bohong (hoax), dan propaganda politik yang dirancang untuk memanipulasi emosi pemilih pemula (Firmansyah & Triana, 2022).

Dalam merespons fenomena tersebut, pemahaman kewarganegaraan siswa MAN 4 Jakarta yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan etika Islam menjadi benteng kontrol yang penting. Pembiasaan nilai-nilai akhlakul karimah dan kejujuran yang ditanamkan di lingkungan madrasah membantu siswa untuk tidak dengan mudah menyebarkan narasi kebencian atau ujaran yang memecah belah di media sosial (Santoso & Utami, 2022). Literasi politik yang terintegrasi dengan pemahaman etika keagamaan ini menciptakan profil pemilih pemula yang tidak hanya kritis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam mengekspresikan pandangan politiknya di ruang publik.

Selain itu, iklim demokrasi internal yang diterapkan di MAN 4 Jakarta, seperti proses Pemilihan Ketua OSIS dan MPK (Pemilukada/Pemilu Sekolah) yang mengadopsi mekanisme pemungutan suara secara langsung dan transparan, menjadi sarana laboratorium politik yang sangat efektif bagi siswa. Melalui simulasi proses demokrasi ini, siswa belajar mengenai arti penting penyampaian visi-misi, proses kampanye yang sehat, pengawasan suara, hingga sikap sportif dalam menerima hasil keputusan bersama (Dewi & Budiarto, 2023). Pengalaman praktis ini secara signifikan mampu mengonversi pengetahuan teoritis yang mereka dapatkan di dalam kelas menjadi kesadaran partisipatif yang nyata.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kondisi literasi politik dan pemahaman kewarganegaraan siswa MAN 4 Jakarta telah berada pada tingkatan yang cukup baik dan potensial. Kendati masih terdapat celah dalam hal kedalaman analisis isu serta adanya ancaman paparan disinformasi di ruang digital, para siswa telah memiliki kesadaran dasar bahwa partisipasi politik merupakan instrumen penting untuk mewujudkan perubahan sosial yang positif. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan dari para pendidik di

madrasah agar mampu mengarahkan minat politik siswa dari sekadar pengetahuan menjadi tindakan kewarganegaraan yang substantif, kritis, dan beretika (Putra & Mardiana, 2023).

B. Peran Lingkungan Madrasah dan Media Digital dalam Membentuk Kesadaran Politik

Kesadaran politik di kalangan siswa sekolah menengah tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses sosialisasi politik yang berlangsung secara berkelanjutan. Bagi siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta, pembentukan kesadaran politik ini dipengaruhi secara signifikan oleh dua arena utama yang saling melengkapi: lingkungan internal madrasah sebagai ruang sosial-akademik formal, dan media digital sebagai ekosistem informasi informal (Fauzi & Lestari, 2023). Kombinasi antara pembiasaan nilai-nilai keagamaan, iklim organisasi sekolah, serta tingginya intensitas interaksi di ruang siber menciptakan pola pembentukan literasi dan sikap politik yang khas pada generasi muda berbasis madrasah (Lembaga Penjaminan Mutu MAN 4 Jakarta, 2023).

Lingkungan madrasah berfungsi sebagai sarana utama dalam meletakkan fondasi etika dan pengetahuan dasar kewarganegaraan. Di MAN 4 Jakarta, proses sosialisasi politik formal tidak hanya bertumpu pada materi pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di dalam kelas, melainkan juga dihidupkan melalui dinamika organisasi kesiswaan seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) (Sutrisno & Handayani, 2023). Organisasi-organisasi ini bertindak sebagai "laboratorium demokrasi kecil" tempat siswa belajar memahami alur kepemimpinan, proses negosiasi, artikulasi aspirasi, hingga penyelesaian konflik secara mufakat (Kurniawan, 2022). Kegiatan tahunan seperti Pemilihan Ketua OSIS dan MPK (Pemilukada Sekolah) yang diselenggarakan secara langsung, jujur, dan transparan memberikan pengalaman praktis bagi siswa mengenai arti penting hak suara dan akuntabilitas publik (Dewi & Budiarto, 2023).



Gambar 1: Sosialisasi Politik Siswa

Selain melalui iklim organisasi, lingkungan madrasah memberikan warna tersendiri dalam pembentukan kesadaran politik melalui penanaman etika keagamaan. Nilai-nilai Islam yang diajarkan di MAN 4 Jakarta, seperti konsep musyawarah, adil, amanah, dan tabayyun (konfirmasi fakta), diserap oleh siswa sebagai landasan moral dalam menilai perilaku para aktor politik nasional (Santoso & Utami, 2022). Nilai tabayyun, misalnya, menjadi prinsip esensial yang membentengi siswa agar tidak mudah terjebak dalam arus fitnah, politik identitas destruktif, atau penyebaran narasi kebencian menjelang kontestasi pemilu (Putra & Mardiana, 2023). Dengan demikian, lingkungan madrasah tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan politik (political knowledge), tetapi juga membentuk kesadaran etik (ethical consciousness) dalam berdemokrasi.

Di sisi lain, media digital hadir sebagai akselerator yang memperluas cakrawala politik siswa di luar batas-batas fisik sekolah. Sebagai kelompok masyarakat digital natives, siswa MAN 4 Jakarta mengakses sebagian besar informasi terkait isu-isu kenegaraan, kebijakan publik, dan pergerakan politik nasional melalui platform media sosial seperti X, Instagram, TikTok, dan YouTube (Fauzi & Lestari, 2023). Media digital runtuh sebagai penghambat ruang dan waktu, memungkinkan siswa untuk memantau isu-isu krusial secara real-time—mulai dari pembahasan rancangan undang-undang di parlemen hingga advokasi isu lingkungan dan hak asasi manusia (Nugroho, 2021). Format konten digital yang interaktif, visual, dan singkat membuat isu-isu politik yang semula dianggap kaku menjadi lebih mudah dicerna dan relevan dengan gaya hidup pemuda.

Meskipun media digital menawarkan keterbukaan akses informasi yang luar biasa, ekosistem ini juga menyimpan potensi bahaya yang melimpah bagi pemilih pemula. Algoritma media sosial kerap memicu fenomena echo chamber dan polarisasi sosial, di mana pengguna hanya disajikan narasi yang sesuai dengan preferensi awal mereka semata (Firmansyah & Triana, 2022). Selain itu, maraknya disinformasi, deepfake, dan kampanye hitam (black campaign) yang sengaja diproduksi untuk memanipulasi emosi pemilih muda menjadi ancaman nyata bagi kedewasaan politik siswa (Putra & Mardiana, 2023). Tanpa daya kritis yang memadai, siswa berisiko terombang-ambing oleh opini publik bentukan atau terjebak dalam partisipasi semu yang hanya bersifat emosional tanpa pemahaman substansi isu (Wibowo & Setiawan, 2024).

Interaksi antara lingkungan madrasah dan media digital pada akhirnya menciptakan dinamika yang saling mengoreksi dan melengkapi dalam diri siswa MAN 4 Jakarta. Pengetahuan dan etika yang dipelajari di madrasah bertindak sebagai penyaring (filter) terhadap banjir informasi dan manipulasi di ruang siber (Santoso & Utami, 2022). Sebaliknya, informasi dan wacana kritis yang diperoleh siswa dari media digital memperkaya bahan diskusi mereka di lingkungan madrasah, sehingga pembelajaran di kelas tidak lagi terasa monoton atau tertinggal dari realitas sosial (Sutrisno & Handayani, 2023). Siswa yang mampu mengintegrasikan kedua nilai ini akan tumbuh menjadi pemilih pemula yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kedalaman analisis dan integritas moral yang kuat.

Secara keseluruhan, sinergi yang harmonis antara penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis etika di madrasah dan pemanfaatan media digital secara bijak merupakan sarana paling efektif untuk membangun kesadaran politik siswa MAN 4 Jakarta. Kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan—termasuk pendidik, orang tua, dan pengelola platform media—sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi sarana pembelajaran demokrasi yang sehat, inklusif, dan mengedukasi bagi pemelihara masa depan bangsa (Dewi & Budiarto, 2023).

C. Bentuk Partisipasi Demokrasi Siswa: Konvensional dan Non-Konvensional

Partisipasi demokrasi di kalangan siswa sekolah menengah mengalami evolusi teoretis dan praktis yang signifikan seiring dengan berkembangnya era teknologi digital. Pada siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta, bentuk-bentuk keterlibatan dalam ranah demokrasi tidak lagi terbatas pada indikator-indikator klasik berbasis lembaga negara atau struktur sekolah formal. Pemahaman literasi politik yang diperoleh dari kombinasi pembelajaran kewarganegaraan, etika madrasah, dan interaksi di ruang siber telah melahirkan pola partisipasi yang beragam, terintegrasi, serta bersifat multi-saluran (Kurniawan, 2022; Wijaya, 2024). Secara garis besar, bentuk partisipasi demokrasi siswa MAN 4 Jakarta dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yakni partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional (Milbrath & Goel, 1977; Dalton, 2008).

Partisipasi konvensional merujuk pada bentuk-bentuk keterlibatan politik yang berlangsung melalui saluran-saluran resmi, terstruktur, dan diakui secara legal-formal dalam sistem demokrasi (Milbrath & Goel, 1977). Bagi siswa MAN 4 Jakarta yang sebagian besar berada pada rentang usia pemilih pemula (16–18 tahun), partisipasi konvensional mewujudkan dalam dua ranah utama: ranah internal sekolah dan ranah publik kenegaraan. Di ranah internal madrasah, keterlibatan konvensional ini terefleksikan secara nyata melalui proses Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) (Lembaga Penjaminan Mutu MAN 4 Jakarta, 2023).



Gambar 2: Bentuk Partisipasi Demokrasi Siswa

Dalam arena internal ini, siswa berlatih menggunakan hak pilih mereka secara langsung, tertib, dan rahasia. Keterlibatan siswa tidak hanya sebatas mencoblos pada hari pemungutan suara, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif sebagai panitia penyelenggara (seperti Panitia Pemilihan Umum Sekolah), saksi, hingga peserta yang menguji gagasan para kandidat dalam debat terbuka (Dewi & Budiarto, 2023). Sementara di ranah publik kenegaraan, siswa yang telah genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP elektronik menunjukkan partisipasi konvensional melalui pendaftaran diri sebagai pemilih dan penggunaan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada momentum Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah (Ramadhan, 2020). Antusiasme siswa dalam mencoblos pada pemilu resmi mencerminkan bahwa kesadaran dasar mengenai pentingnya legitimasi kepemimpinan formal telah tertanam baik melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah (Sutrisno & Handayani, 2023).

Namun demikian, tipe kepribadian dan gaya hidup generasi Z yang cenderung mandiri, fleksibel, serta menyukai ekspresi bebas mendorong lahirnya bentuk partisipasi non-konvensional yang jauh lebih dinamis (Dalton, 2008; Wijaya, 2024). Partisipasi non-konvensional merujuk pada bentuk keterlibatan warga negara yang berada di luar saluran kelembagaan resmi, tetapi bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik, mengawal keadilan sosial, atau menyuarakan aspirasi kelompok (Milbrath & Goel, 1977). Di MAN 4 Jakarta, ruang digital dan platform media sosial seperti X, Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi arena bertumbuhnya aksi-aksi non-konvensional ini secara masif (Fauzi & Lestari, 2023).

Partisipasi non-konvensional di kalangan siswa MAN 4 Jakarta manifestasikan dalam pelbagai cara kreatif. Salah satu bentuk yang paling dominan adalah pemanfaatan tagar (hashtag) advokasi dan keikutsertaan dalam penandatanganan petisi daring terkait isu-isu krusial, seperti kebebasan berpendapat, pelestarian lingkungan hidup, hak-hak perempuan, dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan (Nugroho, 2021). Siswa tidak lagi pasif menerima keputusan dari penguasa; mereka memanfaatkan akun media sosial mereka untuk mengunggah ulang (repost), membuat thread penjelasan, hingga memproduksi konten infografis atau video pendek yang mengedukasi kawan sebaya mengenai substansi suatu rancangan undang-undang atau fenomena penyalahgunaan kekuasaan (Santoso & Utami, 2022).

Selain aksi berbasis digital, partisipasi non-konvensional siswa MAN 4 Jakarta juga tampak dari gerakan aksi sosial-kemanusiaan langsung yang diinisiasi secara independen maupun lewat komunitas kesiswaan. Penggalangan dana solidaritas untuk korban bencana alam, aksi kepedulian terhadap isu Palestina, serta ruang-ruang diskusi lintas sekolah yang membahas keadilan gender merupakan bentuk kesadaran warga negara (citizenship practice) yang melampaui kerangka prosedural pemilu (Suryani & Rahmawati, 2022). Aktivitas ini membuktikan bahwa siswa memahami bahwa politik dan demokrasi bukan hanya perihal berebut kekuasaan lima tahunan, melainkan mengenai kepedulian terhadap nasib sesama dan perbaikan kualitas hidup bersama (Freire, 1970; Kurniawan, 2022).

Pengintegrasian antara partisipasi konvensional dan non-konvensional ini menjadi indikator penting dari kematangan literasi politik siswa di MAN 4 Jakarta. Siswa yang memiliki literasi politik tinggi mampu memanfaatkan kedua saluran tersebut secara proporsional. Mereka menyadari bahwa suara di TPS (konvensional) diperlukan untuk memilih wakil rakyat yang berintegritas, sementara pengawasan publik di media sosial dan aksi sosial (non-konvensional) dibutuhkan untuk memastikan para pejabat tersebut tetap bekerja sesuai dengan amanat rakyat (Susanto & Kusuma, 2023).

Keberadaan dua bentuk partisipasi ini menegaskan bahwa siswa MAN 4 Jakarta telah bertransformasi dari sekadar objek atau target sosialisasi politik pasif menjadi subjek demokrasi yang kritis, responsif, dan bernilai guna tinggi bagi masyarakat di sekitarnya (Putra & Mardiana, 2023). Dengan adanya sinergi yang terus dibina antara bimbingan etika dari madrasah dan kebebasan berkespresi di ruang publik, partisipasi pemuda ini berpotensi besar menjadi pendorong utama terwujudnya konsolidasi demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

D. Tantangan dan Strategi Penguatan Literasi Politik Pemuda di Lingkungan Pendidikan

Upaya penguatan literasi politik di lingkungan pendidikan menengah tidak terlepas dari berbagai tantangan structural maupun kultural yang cukup kompleks. Pada kasus Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta, meskipun ekosistem pembelajaran dan kegiatan kesiswaannya telah

mendukung iklim berdemokrasi, proses pembentukan kesadaran politik siswa tetap menghadapi sejumlah hambatan nyata di lapangan (Lembaga Penjaminan Mutu MAN 4 Jakarta, 2023). Untuk mengonversi potensi jumlah pemilih pemula menjadi partisipasi demokrasi yang substantif, diperlukan analisis mendalam mengenai tantangan-tantangan tersebut beserta perumusan strategi penguatan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan (Dewi & Budiarto, 2023).

Tantangan pertama yang mendasar adalah adanya stigma negatif dan pandangan tabu terhadap topik politik praktis di lingkungan sekolah maupun keluarga. Politik sering kali diidentikkan dengan konflik, manipulasi kekuasaan, pencitraan, dan korupsi (Hidayat, 2020). Ketakutan akan terjadinya polarisasi atau gesekan antarsiswa menyebabkan sebagian tenaga pendidik enggan membuka ruang diskusi kritis mengenai isu-isu politik aktual di dalam kelas (Sutrisno & Handayani, 2023). Akibatnya, wacana politik yang diterima siswa menjadi terbatas pada aspek teoritis-normatif semata tanpa terhubung dengan realitas sosial yang sedang berkembang.



Gambar 3: Tantangan dan Strategi Literasi Politik

Tantangan kedua terletak pada pola pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang di beberapa aspek masih berorientasi pada hafalan dan penyampaian bersifat doktriner. Pembelajaran yang terlalu berfokus pada penghafalan nama-nama lembaga negara atau pasal-pasal konstitusi tanpa disertai dengan metode studi kasus (*case-based learning*) atau debat isu publik membuat materi merasa membosankan bagi generasi muda (Kurniawan, 2022). Kondisi ini menyebabkan timbulnya jurang pemisah (*gap*) antara apa yang dipelajari siswa di papan tulis dengan dinamika politik nyata yang mereka saksikan sehari-hari melalui gawai mereka.

Tantangan ketiga dipicu oleh tingginya paparan disinformasi, kampanye hitam, serta maraknya fenomena echo chamber di media sosial. Siswa yang merupakan digital natives lebih sering mengonsumsi narasi politik dari platform digital tanpa dibekali keterampilan verifikasi fakta (*fact-checking*) yang memadai (Fauzi & Lestari, 2023; Putra & Mardiana, 2023). Algoritma media sosial yang cenderung mengamplifikasi konten sensitif dan provokatif rentan menggiring persepsi siswa ke dalam polarisasi tajam, sehingga menurunkan kualitas literasi politik mereka dari yang seharusnya rasional-kritis menjadi emosional-sektarian (Firmansyah & Triana, 2022).

Guna mengatasi rangkaian tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terstruktur untuk menguatkan literasi politik siswa, khususnya di lingkungan MAN 4 Jakarta. *Pertama*, Pembaruan Metode Pembelajaran PPKn Berbasis Isu Kontemporer: Lembaga pendidikan perlu menggeser pendekatan pembelajaran dari tekstual-hafalan menuju pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dan diskusi kritis. Guru PPKn dapat mengangkat isu-isu publik yang relevan dengan kehidupan remaja—seperti kebijakan ketersediaan lapangan kerja, kebebasan berpendapat di media sosial, atau kebijakan lingkungan—sebagai bahan bedah kasus di dalam kelas (Sutrisno & Handayani, 2023). Pembelajaran interaktif ini terbukti efektif memicu *critical consciousness* siswa (Freire, 1970; Santoso & Utami, 2022).

Kedua, Optimalisasi Laboratorium Demokrasi Kesiswaan: Organisasi sekolah seperti OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler jurnalistik harus terus difungsikan sebagai wahana simulasi politik yang transparan dan independen. Pemilihan Ketua OSIS yang mengadopsi prinsip-prinsip Pemilu nasional (menggunakan kampanye program, debat publik terbuka, hingga penghitungan suara berbasis sistem digital) memberikan pengalaman bermakna (*meaningful experience*) bagi siswa mengenai arti penting kejujuran dan akuntabilitas (Dewi & Budiarto, 2023).

Ketiga, Penguatan Integrasi Literasi Digital dan Etika Keagamaan: Pendidikan politik di madrasah perlu dipadukan secara kuat dengan literasi media digital dan nilai-nilai akhlakul karimah. Siswa dibekali keterampilan praktis untuk menyaring informasi, mengenali ciri-ciri berita hoax, serta menerapkan prinsip tabayyun sebelum mengunggah atau membagikan suatu isu politik di media sosial (Putra & Mardiana, 2023). Langkah ini menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai panduan moral bagi siswa dalam berpendapat secara santun dan bertanggung jawab di ruang siber.

Keempat, Sinergi dan Kolaborasi Eksternal: Pihak madrasah perlu membina kerja sama yang intensif dengan lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), institusi perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemuda dan demokrasi (Arifin & Widyastuti, 2023). Sosialisasi politik yang dikemas secara komunikatif, interaktif, dan ramah pemuda oleh pihak luar dapat memberikan perspektif yang lebih segar, memperluas wawasan siswa, serta menghapus stigma tabu terhadap politik (Baskoro, 2022).

Implikasi dari keberhasilan penerapan strategi penguatan literasi politik ini sangat penting bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Siswa yang tumbuh dalam ekosistem pendidikan yang kritis dan inklusif akan bertransformasi menjadi pemilih pemula yang rasional, tahan terhadap bujukan politik uang (money politics), serta aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara negara (Susanto & Kusuma, 2023). Pada akhirnya, investasi pendidikan politik di jenjang sekolah menengah seperti MAN 4 Jakarta merupakan pijakan utama untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang substantif, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Suryani & Rahmawati, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai peran literasi politik dalam meningkatkan partisipasi demokrasi siswa di lingkungan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa literasi politik memegang peranan yang sangat fundamental dalam mentransformasi pemilih pemula dari kelompok pasif menjadi warga negara yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Pemahaman kewarganegaraan siswa tidak lagi terbatas pada hafalan materi tekstual dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, melainkan telah berkembang menjadi kesadaran kritis dalam merespons dinamika sosial-politik dan kebijakan publik yang terjadi di masyarakat.

Proses pembentukan literasi politik siswa ditopang oleh dua arena utama yang saling menguatkan, yaitu iklim internal sekolah atau madrasah dan media digital. Lingkungan sekolah menyediakan fondasi etika berbasis nilai-nilai moral dan keagamaan, seperti musyawarah dan penelusuran kebenaran informasi, serta laboratorium demokrasi praktis melalui kegiatan kesiswaan dan pemilihan pengurus organisasi sekolah secara transparan. Sementara itu, media digital berfungsi sebagai pemacu yang memperluas akses informasi siswa terhadap isu-isu publik, meskipun di sisi lain menuntut kecakapan pemilihan informasi guna menghindari ancaman disinformasi, propaganda, dan polarisasi opini di ruang siber.

Kematangan literasi politik siswa tercermin dari keberagaman bentuk partisipasi demokrasi yang mereka tunjukkan. Partisipasi tersebut mencakup jalur formal konvensional, seperti penggunaan hak pilih dalam pemilihan organisasi sekolah maupun dalam pemilu nasional bagi yang telah memenuhi syarat usia, hingga jalur non-konvensional yang berbasis media sosial. Jalur non-konvensional ini meliputi advokasi isu-isu sosial, penyebaran konten edukasi politik, hingga keterlibatan dalam ruang diskusi publik digital. Pengintegrasian kedua bentuk partisipasi ini membuktikan bahwa penguatan literasi politik secara efektif mampu memutus rantai apatisme pemuda dan mendorong terciptanya keterlibatan demokrasi yang substantif, inklusif, serta berkelanjutan bagi masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baskoro, A. (2022). *Institusi Partai Politik dan Tantangan Keterlibatan Pemuda*. Jakarta: Pustaka Politik Indonesia.
- Crick, B. (2000). *Essays on Citizenship*. London: Continuum.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Dalton, R. J. (2008). *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. Washington, D.C.: CQ Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum

- Hidayat, R. (2020). *Apatisme Politik Anak Muda: Antara Realitas Kebijakan dan Persepsi Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Kurniawan, B. (2022). *Literasi Politik dan Kesadaran Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?*. Chicago: Rand McNally College Publishing.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramadhan, F. (2020). *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilu Serentak*. Surabaya: Penerbit Ilmu Rakyat.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, K. (2024). *Gaya Partisipasi Politik Non-Konvensional Generasi Muda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL

- Arifin, M., & Widyastuti, R. (2023). Peran Komunitas Masyarakat Sipil dalam Edukasi Politik Pemuda di Era Digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 8(2), 115–129.
- Dewi, S. K., & Budiarto, T. (2023). Kesenjangan Akses Pendidikan Kewarganegaraan Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Demokrasi*, 12(1), 45–58.
- Fauzi, A., & Lestari, D. (2023). Media Sosial dan Pola Konsumsi Informasi Politik Generasi Z. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 10(3), 201–215.
- Firmansyah, R., & Triana, N. (2022). Bahaya Echo Chamber dan Disinformasi terhadap Polarisasi Pemilih Muda. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 7(1), 89–102.
- Nugroho, Y. (2021). Keterlibatan Digital dan Gerakan Aksi Sosial Pemuda Indonesia. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 15(2), 134–148.
- Pratama, I. G. (2021). Bonus Demografi dan Tantangan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Jurnal Dinamika Politik*, 6(2), 77–90.
- Putra, D. A., & Mardiana, E. (2023). Penguatan Literasi Digital Sebagai Benteng Informasi Pemilih Muda. *Jurnal Media dan Kebijakan*, 9(1), 33–47.
- Santoso, H., & Utami, P. (2022). Membangun Critical Consciousness di Ruang Siber. *Jurnal Critical Pedagogy*, 4(1), 60–74.
- Suryadi, K. (2021). Pendidikan Politik dan Disparitas Akses Informasi di Daerah Rural. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 11(3), 180–194.
- Suryani, L., & Rahmawati, A. (2022). Peran Strategis Pemuda dalam Pengawasan Kebijakan Publik. *Jurnal Transformasi Sosial*, 5(2), 99–112.
- Susanto, T., & Kusuma, W. (2023). Resistensi Pemilih Muda Terhadap Politik Uang dan Populisme. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 14(2), 150–165.
- Sutrisno, E., & Handayani, S. (2023). Evaluasi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah. *Jurnal Pedagogi Kewarganegaraan*, 8(1), 22–36.
- Wibowo, A., & Setiawan, I. (2024). Partisipasi Semu dan Mobilisasi Politik Identitas di Media Sosial. *Jurnal Analisis Politik*, 11(1), 55–69.

LAPORAN

- Lembaga Penjaminan Mutu MAN 4 Jakarta. (2023). *Laporan Evaluasi Diri Madrasah dan Profil Kesiswaan MAN 4 Jakarta Tahun Ajaran 2022/2023*. Jakarta: MAN 4 Jakarta.